DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN SIJUNJUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

GAMA NOVENDRA
NIM. 05940/2008

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN SIJUNJUNG

Nama	**: Gama Novendra**
BP/NIM	**: 2008/05940**
Keahlian	**: Perencanaan Pembangunan**
Prodi	**: Ekonomi Pembangunan**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, Februari 2016

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr, Hasdi Aimon, M.Si	**Dewi Zaini Putri, SE, MM**
NIP. 19550505 197903 1 010	**NIP.19850804 200812 2 003**

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Drs. Ali Anis, M.S
NIP.19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN SIJUNJUNG

Nama	**: Gama Novendra**
BP/NIM	**: 2008/05940**
Keahlian	**: Perencanaan Pembangunan**
Prodi	**: Ekonomi Pembangunan**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr, Hasdi Aimon, M.Si	1.
2.	Sekretaris	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	2.
3.	Anggota	: Drs. Zul Azhar M.Si	3.
4.	Anggota	: Novya Zulva Riani, SE, M.Si	4.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Gama Novendra
NIM/Thn Masuk	: 05940/2008
Tempat/Tgl. Lahir	: Padang, 12 November 1989
Keahlian	: Perencanaan Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Komplek Mawar Putih No. K/13 Kuranji Padang
No Telp/Hp	: 081364753830
Judul Skripsi	: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Sijunjung

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran sendiri tanpa bantuan dari orang lain secara penuh melainkan arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini akan sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2016
Yang Menyatakan,

Gama Novendra
2008.05940

ABSTRAK

Gama Novendra, 2008/05940: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Sijunjung. Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibu Dr.Hasdi Aimon, MSi dan Ibu Dewi Zaini Putri , SE,MM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap struktur perkonomian di Kabupaten Sijunjung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adakah PDRB Kabupaten Sijunjung menurut lapangan usaha yang terdiri dari 9 sektor dan jumlah penduduk Kabupaten sijunjung. Data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 1996-2013.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan kuantitatif, yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari instansi pemerintah yang terkait. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah yang pertama Analisis Overlay yaitu; *Loqation Quotien* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), yang kedua yaitu; *Analisis Klassen Typology* dan yang ketiga yaitu; *Analisis Shift Share*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan analisis dampak pemekaran wilayah terhadap struktur perekonomian di Kabupaten sijunjung adalah (1) sektro unggulan di Kabupaten Sijunjung sebelum dan sesudah pemekaran beralih dari sector pertanian ke sector bangunan dan jasa - jasa, (2) Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung beralih dari kategori daerah sedang tumbuh menjadi daerah relative tertinggal , dan (3) Struktur perekonomian di Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran terdiri dari lima struktur yang memberikan kontribusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan bagi pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan pengembangan sector agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemekaran di Kabupaten Sijunjung serta perhatian khusus bagi sector pertambangan dan penggalian mengingat kontribusi yang diberikan sesudah sector pertanian dan jasa-jasa.

Kata Kunci ; PDRB Kabupaten Sijunjung, jumlah penduduk, LQ, MRP, Analisis Klassen dan Anlisis Shift Share

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya. Berkat rahmat dan hidayah-nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis persembahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-nya dari alam kejahiliahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Sijunjung".**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Bapak Dr, Hasdi Aimon, M.Si selaku pembimbing I sekaligus sebagai Pembimbing Akademis penulis, yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan dengan penuh keikhlasan demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya juga terima kasih kepada Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku pembimbing II. Disamping itu juga terima kasih kepada :

1. Ibu dosen penguji Bapak Drs. Zul Azhar M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si yang telah memberikan kritikan dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Teristimewa kepada Mama dan Papa tercinta serta kak Efit,bang Wandri,ponakan oom Acad dan Acid, yang telah tulus dan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman–teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2008 tanpa terkecuali, Se7en family, Bels Casino, Icha, Ozzie, Yudi, dan Heru yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua. Aamiin.

Padang, Februari 2016
Penulis,

Gama Novendra

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
BAB II. KAJIAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN
A. Kajian Teori 14
1. Pemekaran Daerah 14
2. Konsep Otonomi Daerah 15
3. Perubahan Struktur Ekonomi 17
4. Teori Basis Ekonomi dan Sektor Unggulan 18
5. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah 23
6. Analisis Shift Share 24
B. Penelitian Terdahulu 26
C. Kerangka Pemikiran 28
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 31
B. Tempat dan Waktu Penelitian 31
C. Jenis dan Sumber Data 31
D. Teknik Pengumpulan Data 32
1. Teknik Dokumenter 32
2. Studi Kepustakaan 32

E. Definisi Operasional 32
F. Teknik Analisis Data 34
1. Analisis Loqation Quotien (LQ) 34
2. Model Ratio Pertumbuhan (MRP) 35
3. Analisis Overlay 37
4. Analisis Klassen Typology 38
5. Analisis Shift Share 40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 43
1. Wilayah Administratif 43
2. Kependudukan 44
3. Pendidikan dan Ketenagakerjaan 45
4. Perekonomian Kabupaten Sijunjung 46
B. Hasil Penelitian 48
a) Analisis Sektor Unggulan 48
1. Analisis Loqation Quotien (LQ) 48
2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan 51
3. Analisis Overlay 58
b) Analisis Klassen Typology 59
c) Perubahan Struktur Perekonomian
Analisis Shift Share 60
C . Pembahasan 69
1) Sector Unggulan di Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran 69
2) Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Sesudah Pemekaran 72
3) Perubahan Struktur Perekonomian di Kabupaten sijunjung Sebelum dan Sesudah Pemekaran 73

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Harga Konstan2000 Menurut Lapangan Usaha 5
2. Kontribusi Sektor Sektor Ekonomi Kabupaten Sijunjung dalam Struktur PDRB Atas Harga Konstan 2000.....9
3. Rata-Rata Nilai LQ *(Loqation Quotion)* di Kabupaten Sijunjung, Tahun 1996-2013.....48
4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten Sijunjung Tahun 1996-2013.....52
5. Analisis *Overlay* Kabupaten Sijunjung Tahun 1996-2013.....58
6. Klasifikasi Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Sesudah Pemekaran Berdasarkan *Klassen Typology*.....59
7. Rasio PDRB Kabupaten Sijunjung dan PDRB Sumatera Barat (nilai Rij,Rin danRn).....61
8. Hasil analisis shift share periode pemekaran 1996-2013.....62
9. Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sijunjung 1996-2013 (Juta Rupiah) Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Provinsi.....64
10. Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sijunjung 1996-2013 (Juta Rupiah) berdasarkan komponen Pertumbuhan Sektoral 66
11. Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sijunjung 1996-2013 (juta rupiah) berdasarkan komponen Pertumbuhan daya saing wilayah 68

DAFTAR GAMBAR

Tabel **Halaman**

1. Kerangka Konseptual Perekonomian Kabupaten Sijunjung..... 30

2. Klasifikasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan Klassen Typology..... 38

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik sehingga berdampak pada pembangunan di setiap wilayah di Indonesia. Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2001. Pemekaran daerah kabupaten dan kota dan juga provinsi menjadi fenomena, sejak saat itu jumlah daerah terus bertambah. Sebenarnya pembentukan daerah baru dengan pertimbangan mendekatkan pelayanan public pada masyarakat ataupun pertimbangan strategis geopolitik dan geoekonomi,sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahn daerah yang di berlakukan sejak januari 2001. Undang-undang 22 tahun 1999 membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Aturan pelaksanaan pemekaran di atur dalam PP Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah (Juanda,2007).

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningaktan pelayanan public, yaitu (1) keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat

memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingakan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan mencakup wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet,2005). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas,maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia, (2) mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal (Hermanislamet,2005). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidaak tergali dan (3) penyerapam tenga kerrja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha,karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Sjafrizal (2008:231) dampak dari sentralisasi yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru, dimana proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang sangat besar. Sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumberdaya nasional, terutama dana pembangunan. Hal itu terlihat dari banyaknya propinsi yang kaya sumberdaya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat rendah dan ketinggalan dari daerah lainnya.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang turut mengalami pemekaran. Daerah dimana dibentuknya daerah administratif baru yaitu Kabupaten Dharmasraya melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Dampak dari kebijakan pemekaran tersebut mungkin saja akan mempengaruhi struktur dan kondisi perekonomian di kabupaten induknya dalam hal ini Kabupaten Sijunjung. Sektor-sektor yang menjadi unggulan sebelum terjadi pemekaran akan berubah dan berganti setelah terjadinya pemekaran. Semua potensi sumber daya alam serta potensi pariwisata yang ada tentunya akan mampu untuk terus meningkatkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung dan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung akan lebih bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

PDRB Kabupaten Sijunjung terdiri dari sembilan sektor yaitu (1) Sektor Pertanian(2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Listrik,Gas dan Air Bersih (5) Bangunan (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran (7) Pengangkutan dan Komunikasi (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (9) Jasa-Jasa.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Harga Konstan2000 Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha	Sebelum Pemekaran							Sesudah Pemekaran									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3.36	0.15	0.67	3.85	2.60	5.49	7.84	6.65	3.25	3.37	1.03	4.68	4.54	5.17	5.26	5.47	5.51
Pertambangan	10.25	18.25	1.02	0.49	9.07	7.70	-5.68	3.92	10.85	3.81	11.72	5.93	7.68	6.60	5.20	5.23	5.18
Industri pengolahan	6.25	-5.99	2.70	3.73	2.17	1.09	7.66	10.14	7.53	6.48	7.14	7.34	7.24	5.04	5.91	5.22	5.24
Listrik dan air bersih	18.26	9.84	16.15	13.15	10.93	5.69	3.62	7.00	16.79	37.49	11.15	3.28	7.08	7.45	7.25	7.46	7.45
Bangunan	4.01	-35.44	-1.38	3.91	1.83	0.36	14.95	8.02	6.71	9.88	3.06	5.16	5.17	6.59	7.04	8.99	9.15
Perdagangan,hotel,restoran	4.47	-12.50	1.73	3.46	3.53	3.50	4.63	4.47	3.00	5.86	5.14	5.50	4.56	4.47	5.09	5.81	5.84
Angkutan/komunikasi	9.46	-2.46	1.56	5.49	1.94	4.74	9.01	6.18	5.11	9.21	7.11	5.53	6.13	6.74	7.12	5.19	5.24
Bank/keu/perum	7.01	-12.64	-2.53	8.06	1.99	2.56	3.86	11.01	4.10	3.46	5.40	5.97	5.30	5.56	6.09	6.23	6.26
Jasa	0.47	0.06	2.39	4.57	4.91	4.67	2.78	2.85	3.80	7.52	7.85	4.76	4.77	5.22	5.86	6.79	6.83
Total	4.82	-3.38	1.24	3.74	4.09	4.64	4.68	5.71	5.32	5.95	5.62	5.27	5.49	5.64	5.74	6.08	6.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah) tahun 1997-2013

Tabel 1.1 menggambarkan perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran dari tahun 1997 sampai tahun 2003 yang terdiri dari Sembilan sektor. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung dari tahun 1997 sampai 2003 jika dilihat dari rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan namun pada tahun 1998 mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni sebesar -3,38%. Penurunan PDRB ini merupakan imbas dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut dimana PDRB yang terdiri dari sektor – sektor mengalami perlambatan serta penurunan pertumbuhan yang cukup tajam. Jika dilihat secara spesifik, pada tahun 1997 tiga dari sembilan sektor yakni sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih serta pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang tinggi yakni sebesar 10,25% pada sektor pertambangan dan penggalian, 18,26% pada sector listrik gas dan air bersih, 9,46% pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan dan perdagangan hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2003 sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2000. Peningkatan pertumbuhan empat sektor sebesar 7,84% pada sektor pertanian , 7,66% pada sektor industri pengolahan, 14,95% pada sektor bangunan, 4,63% pada sektor perdagangan hotel dan restoran serta 8,06% pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dipicu oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut sehingga kontribusi yang diberikan terhadap perkembangan PDRB pada tahun tersebut cukup tinggi.

Pada tahun 1998 terjadi perlambatan serta penuruan pertumbuhan yang sangat tajam pada sektor pertanian sebesar 0,15% , industri pengolahan -5,99%, listrik, air dan gas sebesar -35,44%, bangunan -12,5%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,46% perdagangan hotel dan restoran, keuangan, persewaan sebesar dan jasa perusahaan sebsar -12,64 % serta jasa – jasa 0,06 %. Perlambatan serta Penurunan yang tajam dipicu oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun tersebut sehingga tujuh dari sembilan sektor memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung.

Pada tahun 2004 terjadi kebijakan otonomi daerah dimana dipisahkannya Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan rata-rata PDRB Kabupaten Sijunjung pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung berfluktuasi hal ini terlihat terjadi beberapa perlambatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2005, 2007 dan 2008 kemudian kembali meningkat pada tahun selanjutnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 5,95%. Perlambatan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,27%.

Secara spesifik jika dilihat dari sector-sektor yang memberikan kontribusi terhadap perumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 6,65%, 10,14% dan 11,01%. Sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 37,49%

pada sektor listrik, gas dan air bersih, 9,88% pada sektor bangunan, 5,86% pada sektor perdagangan hotel dan restoran , 9,21% pada sektor pengangkutan dan komunikasi dan 7,42% .Sedangkan pertmbuhan tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian terjadi pada tahun 2007 sebesar 11,72%. Pada tahun 2004 sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 3,92%, 6,18% dan 2,85%.

Tabel 1.2 Kontribusi Sektor Sektor Ekonomi Kabupaten Sijunjung dalam Struktur PDRB Atas Harga Konstan 2000

Lapangan usaha	Sebelum Pemekaran								Sesudah Pemekaran									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	27.80	27.41	28.41	28.25	28.28	27.88	28.10	28.95	29.21	28.64	27.94	26.73	26.58	26.34	26.22	26.10	25.95	25.80
Pertambangan	13.08	13.75	16.83	16.80	16.27	17.05	17.55	15.81	15.55	16.36	16.03	16.96	17.06	17.42	17.58	17.49	17.35	17.19
Industri pengolahan	4.87	4.94	4.81	4.88	4.88	4.79	4.62	4.75	4.95	5.06	5.08	5.16	5.26	5.34	5.31	5.32	5.28	5.24
Listrik dan air bersih	0.47	0.53	0.61	0.70	0.76	0.81	0.82	0.81	0.82	0.91	1.18	1.24	1.22	1.24	1.26	1.28	1.29	1.31
Bangunan	14.65	14.53	9.71	9.46	9.48	9.27	8.89	9.76	9.98	10.11	10.48	10.23	10.22	10.19	10.28	10.41	10.69	11.00
Perdagangan,hotel,restoran	13.32	13.27	12.02	12.08	12.05	11.98	11.85	11.85	11.71	11.45	11.44	11.39	11.41	11.31	11.19	11.12	11.09	11.06
Angkutan/komunikasi	5.91	6.18	6.24	6.26	6.36	6.23	6.24	6.49	6.52	6.51	6.71	6.80	6.82	6.86	6.93	7.02	6.97	6.91
Bank/keu/perum	4.08	4.16	3.76	3.62	3.78	3.70	3.63	3.60	3.78	3.73	3.65	3.64	3.66	3.66	3.65	3.67	3.67	3.67
Jasa	17.94	17.19	17.81	18.01	18.15	18.30	18.30	17.97	17.48	17.23	17.49	17.86	17.77	17.65	17.58	17.60	17.72	17.83
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah) 1997-2003

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 1996 hingga 2003 sebelum terjadinya pemekaran dengan Kabupaten Sijunjung, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup tinggi dan dominan dalam perekonomian Kabupaten Sijunjung dan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa. Sedangakan sektor terendah memberikan kontribusinya adalah sector listrik gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Dengan demikian sektor pertanian di Kabupaten Sijunjung tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika sektor pertanian ini dapat diolah dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung sehingga dapat meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian tersebut.

Setelah pemekaran pada tahun 2003 beberapa sektor mengalami peningkatan kontribusi seperti sektor jasa-jasa, sektor bangunan. Namun beberapa sektor mengalami penurunan kontribusi yakni sektor pertanian meskipun mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung, sektor pertanian tetap menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi. Kontribusi tertinggi tetap diberikan oleh sektor pertanian kemudian diikuti oleh sector jasa-jasa serta pertambangan dan penggalian. Sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran Tiga sektor yakni sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan pertambangan dan penggalian tetap menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung meskipun ada penurunan peningkatan pada sector pertanian.

Dari Pemekaran wilayah yang terjadi tentunya secara langsung akan mempengaruhi struktur perekonomian di Kabupaten Sijunjung sebagai daerah induk pemekaran. Banyak sektor ekonomi yang awalnya menjadi unggulan di Kabupaten Sijunjung menjadi bergeser dan berubah pasca dimekarkannya Kabupaten Dharmasraya. Dilihat juga dari pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten sijunjung , apakah perekonomian Kabupaten Sijunjung menjadi lebih baik atau lebih buruk setelah terjadinya kebijakan pemekaran tersebut. Berdasarkan uraian di atas, apakah sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung baik sebelum dan setelah pemekaran dengan Kabupaten Dharmasraya dapat dikaji dengan lebih rinci Sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi sektoral di Kabupaten Sijunjung dapat diketahui serta untuk mengetahui sektor mana yang menjadi unggulan di Kabupaten Sijunjung sebelum dan sesudah pemekaran. Serta mengidentifikasi apakah telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Sijunjung pasca terjadinya pemekaran, dimana hal ini bisa dijadikan acuan apakah kebijakan pemekaran yang terjadi di Kabupaten Sijunjung berhasil atau tidak.

Setelah mengetahui hal tersebut maka kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung diharapkan lebih terarah dan tepat sasaran guna terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sijunjung. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Sijunjung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sektor apa sajakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran terhadap Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah perubahan struktur perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah di atas dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis sektor apa sajakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran?
2. Untuk menganalisis bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung sebelum dan sesudah pemekaran terhadap Provinsi Sumatera Barat ?
3. Untuk menganalisis bagaimanakah perubahan struktur perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sijunjung sebelum dan sesudah pemekaran?

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dan instansi yang terkait untuk merumuskan kebijakan–kebijakan dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.

3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian yang terkait pada bidang penelitian yang sama.

4. Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi regional dan wilayah.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. KajianTeori

1. Pemekaran Daerah

Menurut (Syafrizal 2008) Terdapat beberapa hal dimana faktor pemicu pemekaran daerah sebagai berikut :

a. Perbedaan Agama

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu Negara atau daerah yang telah ada menjadi suatu Negara atau daerah baru.

b. Perbedaan Etnis dan Budaya

Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis (suku bangsa) dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah.

c. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah

Aspek ini juga termasuk dalam ketimpangan dalam ketersediaan sumberdaya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi dan gas alam yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ketimpangan ini akan cenderung membawa kedalam kecemburuan sosial yang akhirnya terjadi keinginan untuk melakukan pemekaran daerah.

d. Luas daerah

Alasannya adalah luas daerah yang terlalu luas atau besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan merata keseluruh pelosok daerah.

Selain factor pemicu pemekaran tersebut juga dapat dilihat factor kelayakan pemekaran yaitu :

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Tidak dapat disangkal bahwa hal pertma yang diperlukan dalam menentukan kelayakan pemekaran daerah suatu daerah adalah menyangkut keuangan daerah bersangkutan.

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Alasannya bila pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan masih rendah, maka pemekaran dikhawatirkan justru akan menyebabkan semakin menurunnya pertumbuhan daerah bersangkutan.

c. Kualitas Sumberdaya Manusia

Bila kualitas sumberdaya manusia masih rendah di daaerah bersangkutan, maka pemekaran daerah tersebut bisa berakibat kurang lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan public didaerah bersangkutan.

2. Konsep Otonomi Daerah

Pengertian dari Desentralisasi dan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelengaraan otonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan di daerah, adapun sumber- sumber keuangan daerah diantaranya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain – lain pendapatan yang sah.

Undang - undang tersebut menyatakan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah sebagai sumber pembiayan berasal dari daerah sendiri, yang terdiri dari (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga

utama dalam membiayai kegiatan - kegiatan pembangunan di daerah. Karena semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin baik dalam bidang keuangan daerahnya.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Teori-teori perubahan struktural (*structural-change theory*) memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W. Arthur Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya tentang "surplus tenaga kerja dua sektor" (*two sektor surplus labor*). Berdasarkan model lewis, perekonomian terbelaang terdiri atas dua sektor : sektor subsistem pedesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk, yang di cirikan produktifitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol (zero marginal labor productivity). Situasi yang di golongkan lewis sebagai surplus tenaga kerja (labour surplus) karena tenaga kerjanya dapat di ambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output apapun ; dan sektor industry modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor subsistem secara berangsur-angsur. Mengenai perubahan structural berfokus pada proses yang berlangsung secara berurutan yang dilalui suatu Negara dimana ekonomi, industry, dan stuktur lembaga Negara terbelakang ditransformasi

sejalan dengan waktu agar industry baru dapat menggatikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang "pola-pola pembangunan" (*patterns of development*) memusatkan perhatian pada proses yang mengubah struktur ekonomi, industry dan kelembagaan secara bertahap pada suatu perekonomian yang terbelakang, sehingga memungkinkan tampilnya industry-industri baru untuk menggantikan kedudukan sektor pertanian sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi tidak akan memadai jika harus berdiri sendiri dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2004:139).

4. Teori Basis Ekonomi dan Sektor Unggulan

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa keluar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Tenaga kerja yang berdomisili di wilayah kita, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari wilayah lain termasuk dalam pengertian ekspor.

Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah disebut kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor

basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/sector *service* atau sektor non basis. Sektor non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kenaikannya sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

Menurut Tarigan (2005:28) berdasarkan teori basis ekonomi, perkonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas-batas perkonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal didalam batas-batas perkonomian wilayah tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pengukuran langsung, metode pengukuran tidak langsung, metode campuran dan metode *Location Quuotient* (LQ). Metode pengukuran langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang di produksi dan dari mana mereka menbeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Metode tidak langsung dapat juga di gunakan dengan menggunakan asumsi atau metode

asumsi. Dalam metode asumsi berdasarkan kondisi wilayah (data sekunder) ada kegiatan tertentu yang di asumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan non basis.

Selanjutnya metode campuran. Dalam metode campuran menggabungkan metode asumsi dengan metode langsung. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan yaitu pengumpulan data sekunder. Asumsinya apabila 70 persen atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka itu langsung dianggap basis, sebaliknya apabila 70 persen atau lebih dipasarkan ditingkat lokal maka langsung dianggap non basis. Selanjutnya metode *Location Quotient* (LQ) yaitu membandingkan porsi PDRB/nilai tambah untuk sektor teretentu di wilayah dibandingkan dengan porsi PDRB/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional (Tarigan, 2005:32).

Dari ke empat metode tersebut metode *Location Quotient* (LQ) yang lazim atau banyak dipakai oleh pakar-pakar ekonomi dalam menentukan sektor basis. Dalam bentuk rumus, apabila data yang digunakan dalam bentuk PDRB nasional/propinsi dan PDRB Wilayah analisis Model analisis *Location Quotient* (LQ) dapat dinyatakan sebagai berikut:

Keterangan :

Si : Jumlah PDRB sektor i di Kabupaten Sijunjung

Pi : Jumlah PDRB sektor i di Sumatera Barat

S : Total PDRB seluruh sektor Kabupaten Sijunjung

P : Total PDRB seluruh sektor di Sumatera Barat

1) Jika LQ > 1, artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil industrinya ke daerah lain.
2) jika LQ < 1, artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor non basis dan cenderung mengimpor dari daerah lain.
3) jika LQ = 1, artinya produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi daerah tersebut.

Alat analisis lain yang dirasakan penting dipergunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sijunjung yaitu Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Hal ini mengacu kepada rekomendasi Yusuf dalam Mukti (2008:40) yang menganjurkan untuk menggunakan lebih dari satu alat analisis dalam mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di suatu wilayah. Oleh karena itu, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) turut digunakan untuk menganalisis sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung.

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Dalam analisis MRP terdapat dua macam rasio pertumbuhan, yaitu:

1) Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) merupakan perbandingan antara pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten Sijunjung dengan pertumbuhan PDRB sektor i di Sumatera Barat.

2) Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) perbandingan rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i di Sumatera Barat dengan rata-rata pertumbuhan PDRB di Sumatera Barat.

Setelah melakukan analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis dilanjutkan dengan menggunakan analisis *overlay* yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi kegiatan ekonomi unggulan dalam suatu wilayah yang didasarkan atas kriteria pertumbuhan (hasil analisis wilayah studi atau RPs) dan kriteria kontribusi (hasil analisis LQ).

Menurut Yusuf dalam Mukti (2008:40) terdapat empat kemungkinan yaitu kombinasi antara sektor ekonomi unggulan yang menggambarkan keadaan suatu daerah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya.
2) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil.
3) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar.
4) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu sektor yang tidak dominan baik kriteria pertumbuhan maupun kontribusi.

5. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah merupakan analisis yang cukup penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dapat tergambar potensi relatif perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral terhadap daerah lain disekitarnya. Untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah, para ahli ekonomi biasanya menggunakan analisis Klassen Typology.

Berdasarkan Klassen Typology karakteristik pertumbuhan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Klasifikasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan Klassen Typology

PDRB Perkapita (y) / Laju Pertumbuhan (r)	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Rapid Grow : daerah maju dan tumbuh cepat	Growing Region daerah sedang tumbuh
$r_i < r$	Retarded Region : daerah maju tapi tertekan	Relatively Backward Region : daerah relatif Tertinggal

Sumber : Syafrizal (1997) dalam Nurlatifah

Keterangan;

ri : Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung

r : Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat

yi : Income per kapita Kabupaten Sijunjung

y : Income per kapita Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas bahwa analisis ini digunakan untuk membagi serta membedakan suatu daerah menjadi empat klasifikasi yaitu:

1) Daerah maju dan tumbuh cepat *(rapid growth region)* apabila kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi.
2) Daerah maju tapi tertekan *(retarded region)* apabila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih kecil dari pada laju pertumbuhan ekonomi provinsi akan tetapi pendapatan perkapita kabupaten/kota lebih besar dari pendapatan perkapita provinsi.
3) Daerah berkembang cepat *(growing region)* yaitu daerah yang berkembang dengan cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi akan tetapi pendapatan perkapita kabupaten/kota lebih rendah dari pendapatan perkapita provinsi.
4) Daerah relatif tertinggal *(relatively backward region)* apabila kabupaten/kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita provinsi.

6. Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* (S-S) adalah suatu analisis mengenai perubahan atau pergeseran berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti

produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan metode analisis *shift share* (S-S) karena analisis ini dapat memperinci penyebab perubahan berbagai faktor yang dapat menyebabkan perubahan struktur ekonomi suatu daerah dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Kegunaan analisis analisis S-S ini yaitu melihat perkembangan dari sektor perekonomian suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas, juga melihat perkembangan sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor lain, selain itu analisis ini melihat perkembangan dalam membandingkan besar aktifitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah.

Secara umum terdapat tiga komponen pertumbuhan wilayah dalam analisis dalam analisis S-S (Tarigan 2005:85):

a. Komponen Pertumbuhan Provinsi (*National/Provincial growth component atau share regional*). Hal ini adalah untuk melihat struktur atau posisi relatif suatu daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di wilayah yang menaunginya. Share regional menggambarkan perubahan output suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan secara umum, perubahan kebijakan ekonomi secara nasional atau Provinsi atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh sektor di seluruh wilayah secara seragam. Komponen ini terjadi misalnya karena trend inflasi ataupun karena kebijakan perpajakan.

b. Pertumbuhan sektoral (industrial mix component atau proportionally shift) Merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan produksi suatu wilayah lebih cepat atau lebih lambat dari tingkat pertumbuhan produksi Provinsi karena tingginya konsentrasi industri (sektor) regional. Proportionnaly Shift (PS) ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan permintaan akhir, ketersediaan bahan baku, dan kebijakan sektoral.

c. Pertumbuhan daya saing wilayah (competitive effect component atau different shift) Different shift merupakan suatu alat untuk mengukur seberapa jauh daya saing suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain. Different Shift (DS) ini terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar input dan output, maupun infrastruktur ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Diky Nurikhsan (2007) dengan penelitiannya yang menganalisis sektor- sektor ekonomi unggulan Kota Cimahi periode 2003-2005. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa sektor unggulan dikota Cimahi dengan menggunakan metode LQ terdapat 3 sektor yang menjadi sektor unggulan sektor tersebut adalah sektor bangunan dan konstruksi, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor industri pengolahan.

Muhammad Fajar (2009) dengan penelitiannya tentang identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Waropen. Dari penelitian ini menunjukan

bahwa Perkembangan struktur ekonomi Waropen masih didominasi oleh sektor pertanian tetapi peranannya dari tahun ke tahun mengalami pernurunan, sedangkan penyumbang terbesar kedua adalah sektor jasa - jasa dan penyumbang terbesar ketiga adalah sector bangunan, kedua sector tersebut mempunyai kecenderungan peranannya selalu meningkat.

Nurlafitah (2009) penelitiannya tentang analisis pergeseran perekonomian Kabupaten Ciamis pasca pemekaran Kota Banjar. Hasil penelitian Dari Model Rasio Pertumbuhan (MRP), menjelaskan sebelum pemekaran Kota Banjar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Namun pasca pemekaran Kota Banjar, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis ternyata lebih rendah dari pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan lapangan usaha yang tumbuh dan memiliki daya saing yang kuat, namun setelah pemekaran Kota Banjar lapangan usaha ini kehilangan daya saingnya.

Mukti Riadi (2008) tentang analisis sektor ekonomi potensial di kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa berdasarkan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif,spesialisasi, serta struktur dan pola pertumbuhan ekonominya, maka subsektor tanaman perkebunan merupakan subsektor ekonomi potensial di kabupaten OKU Timur.

Nurlatifa Usya (2006) tentang Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Subang berdasarkan analisis PDRB Kabupaten Subang tahun 1993-2003 menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Subang serta beradasarkan analisis LQ menunjukkan bahwa di Kabupaten Subang terdapat 4 sektor basis yang merupakan sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa.

Romadhani Rajab (2013) Tentang Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan di Provinsi Sumatera Barat menunjukan bahwa terdapat dua sektor yang dominan baik dari segi pertumbuhannya maupun dari kontribusinya yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan analisis PDRB menujukan Bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan dengan peranan sektor primer (pertnian, pertambangan dan penggalian) yang semakin menurun meskipun masih besar kontribusinya terhadap PDRB provinsi Sumatera Barat

C. Kerangka Pemikiran

Dalam pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral dimana dengan mengetahui sektor mana saja yang menjadi sektor unggulan tentunya dapat dilakukan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masayarakat setempat dan tepat sasaran bagi pembangunan daerah tersebut dalam hal ini Kabupaten

Sijunjung.

Dengan melakukan analisis LQ dan MRP dapat diketahui sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung serta membandingkannya dengan daerah dalam skala yang lebih luas dalam hal ini Sumatera Barat. Setelah mengetahui hal tersebut digunakanlah analisis overlay yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi kegiatan ekonomi Unggulan dalam suatu wilayah yang didasarkan atas kriteria pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi.(LQ).

Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam hal ini Kabupaten Sijunjung baik sebelum maupun sesudah pemekaran dapat digunakan analisis Typology Klassen dan Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui perubahan Struktur perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sijunjung sebelum dan sesudah pemekaran. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah kerangka pemikiran seperti gambar 2.2 dibawah ini :

Kerangka Pemikiran

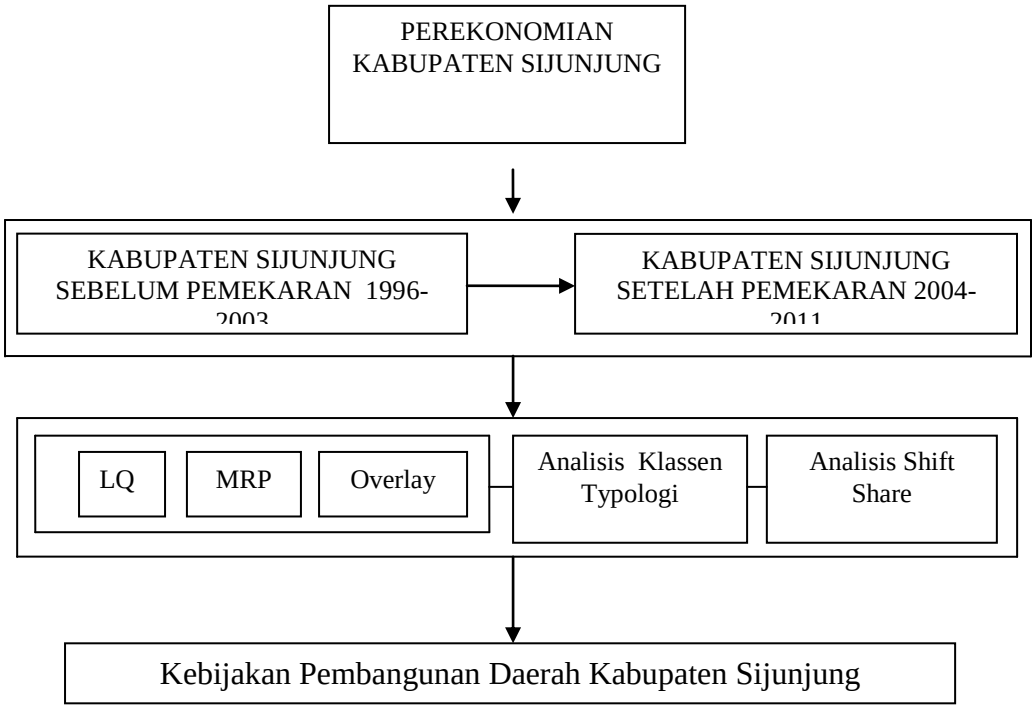

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan melalui berbagai alat analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Diketahui dari analisis LQ, model rasio pertumbuhan dan overlay bahwa sebelum pemekaran terdapat dua sector unggulan di Kabupaten Sijunjung yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa, pasca pemekaran sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung berubah menjadi sector bangunan serta sektor jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemekaran yang terjadi berdampak beberapa perubahan terhadap perekonomian Kabupaten Sijunjung jika dilihat dari segi sektoral.
2. Jika dilihat dari analisis *Klassen Typology* dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi serta PDRB perkapita Kabupaten Sijunjung dengan Sumatera Barat diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Sijunjung sebelum pemekaran karakteristik dan pola pertumbuhan ekonominya termasuk kedalam kategori daerah sedang tumbuh. Pasca pemekaran terjadi perubahan dimana karakteristik dan pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung dikategorikan menjadi sebagai daerah maju dan tumbuh cepat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan pemekaran yang terjadi berpengaruh terhadap karakteristik dan pola pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sijunjung.

3. Dilihat dari Analisis Shift Share, Regional share memberikan nilai terbesar baik sebelum maupun sesudah pemekaran di Kabupaten Sijunjung mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Sijunjung sangat dipengaruhi oleh kebijakan Propinsi yang artinya bahwa tanpa suatu program pembangunan yang spesifik di Kabupaten Sijunjung, PDRB Kabupaten Sijunjung akan tetap meningkat karena adanya kebijakan yang mempengaruhi semua wilayah di Sumatera Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak pemekaran yang terjadi tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian di Kabupaten Sijunjung. Sebelum pemekaran pertumbuhan output sektoral di Kabupaten Sijunjung lebih rendah dari pertumbuhan Sumatera Barat sebesar -26,81 persen namun setelah pemekaran, terjadi kenaikan menjadi lebih tinggi dari pertumbuhan Sumatera Barat yaitu sebesar 23,25 persen. Jika dilihat dari daya saing wilayah Kabupaten Sijunjung dengan daerah lain yang sama dalam konteks Sumatera Barat sebelum pemekaran daya saing sektoral di kabupaten Sijunjung sebesar 36,17 persen , namun setelah pemekaran turun menjadi sebesar -0,65 persen.
4. Dari segi sektoral terdapat sektor unggulan sesudah pemekaran, namun pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung tidak mengalami perubahan apapun. Begitu juga jika dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung yang mana, kebijakan pembangunan di Sumatera Barat masih sangat mempengaruhi Perekonomian Kabupaten Sijunjung. Kesimpulannya, kebijakan pemekaran yang terjadi memberikan dampak positif terhadap

perekonomian Kabupaten Sijunjung sehingga dapat dikatakan kebijakan pemekaran tersebut berhasil dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Sijunjung secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka saran-saran yang dapat diajukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis sektor unggulan (analisis *overlay*) pemerintah Kabupaten Sijunjung sebaiknya mengembangkan sektor yang pertumbuhannya lambat akan tetapi mempunyai kontribusi atau peranan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang cukup besar. Untuk meningkatkan pertumbuhan agar tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pemerintah hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang dengan cara peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor tersebut. Seperti sektor pertanian yang sebelum terjadinya pemekaran adalah sektor dominan dan memberikan kontribusi yang besar, setelah terjadinya pemekaran sektor pertanian ini mengalami pertumbuhan yang tidak dominan tetapi memberikan kontribusi yang besar, di iringi dengan sektor bangunan dan jasa-jasa.
2. Memberikan perhatian kepada peningkatan sektor pertambangan dan penggalian di kabupaten Sijunjung, dimanan sektor ini memberikan

kontribusi besar, pemerintah daerah fokus mengawasi dan memberikan fasilitas agar sektor pertambangan dan penggalianselalu memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan Kabupaten Sijunjung di mana dapat kita ketahui di Kabupaten Sijunjung ini terdapat beberapa tambang liar seperti tambang emas dan tambang batu bara. Maka pemerintah daerah berperan aktif untuk mengawasi agar pelestarian alam tetap terjaga dan juga pendapatan asli daerah juga bertambah apabila di kelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sijunjung menurut Lapangan Usaha 1996-2011*. Propinsi Sumatera Barat : BPS

Badan Pusat Statistik *Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2000-2011*. Propinsi Sumatera Barat : BPS, Padang

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2003. *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2003*. Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat, Padang.

_____. *2004. Sumatera Barat Dalam Angka 2003*. BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.

_____. *2007. Sumatera Barat Dalam Angka 2006*. BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.

_____. *2008. Sumatera Barat Dalam Angka 2007*. BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.

_____. *2012. Sumatera Barat Dalam Angka 2011*. BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.

http://sijunjungkab.go.id

Juanda, B. 2007. *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap APBN, Perkembangan Kinerja Daerah Otonom Baru dan Strategi Pendanaannya*. Workshop Kebijakan Pendanaan Daerah Otonom Baru Departemen Keuangan RI: Bandar Lampung

Nurikhsan, D. 2007. *Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Dikota Cimah periode 2003-2005*[skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung, Bandung.

Nurlafitah. 2009. *analisis pergeseran perekonomian Kabupaten Ciamis pasca pemekaran Kota Banjar* [skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Riadi, M. 2008. *Analisis Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan* [skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.